

**PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DI
KOTA PEKANBARU
(Studi Pada Angkutan Travel Luar Kota dan Dalam Kota)**

FARISWADI
fariez_gid@yahoo.com

Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761) 63277
Contact Person
085265292835

ABSTRACT

Fariswadi. 0801134136. Implementation Transportation Road Traffic Control (LLAJ) In The City Pekanbaru (Studies in Urban and Transport Traveling Outside In Town)

The research was conducted in the city of Pekanbaru is the Department of Transportation Traffic Monitoring the Implementation of Transportation (LLAJ) in Pekanbaru City (Studies in Urban and Transport Traveling Outside In The City) The aim is to determine how the Implementation Monitoring Traffic Transportation (LLAJ) in the city of Pekanbaru (study On Transportation Travel Outside the City and in the City),

The purpose of this study is to investigate the implementation of the Road Traffic and Transport Supervision (LLAJ) in the city of Pekanbaru (Studies in the Outer City Travel and Transportation in the City) and the factors that affect the implementation of the Road Traffic and Transport Supervision (LLAJ) in the city of Pekanbaru (Studies in Out of Town Travel and Transportation in the City).

The method used in this study is the type of data collected included primary data is data that was obtained directly from the informant that was Head, ed wasdal, PO, and the people who became the object of research in the form of information that is relevant to the issues formulated in the research . Include: such as interviews, observation or written remarks. As well as secondary data includes data ie the data that was obtained from the documents and reports that are related to the research problem and also books related to this research. While the data clotting techniques used were interviews, observation and study of literature and.

Techniques of data analysis in this study performed using data processed using qualitative methods where the data obtained from the interview onwards systematically described with reference to the theoretical foundation or government regulations relating to the discussion to find solutions to problems.

From these results it can be concluded that the implementation of Transportation Traffic Monitoring (LLAJ) in Pekanbaru City (Studies in Urban and Transport Traveling Outside In The City). still not running as expected or can not be considered successful as expected, it is evident from the respondents or the public. As for the implementation of monitoring indicators that set standards, conduct assessments and perform corrective actions.

Keywords : implementation, transportation, travel

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu daerah didalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bagaimanapun juga akan sangat tergantung dan ditentukan oleh kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan daerah itu sendiri. Dalam hal ini daerah tersebut bertujuan pula untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh pelaksanaan dan kerjasama pemerintah baik pusat maupun daerah yang bekerjasama mencapai tujuan tersebut.

Kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam usaha pembangunan daerah maka pendapatan asli daerah merupakan sumber pokok yang menentukan tingkat keberhasilan rencana tahunan dalam mencapai dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dari pelaksanaan terhadap pemberian otonomi kepada daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tersebut adalah nyata dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah, maka setiap daerah dapat mengatur sendiri daerahnya. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan daerah di Kota Pekanbaru yang berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi maka Kota Pekanbaru mempunyai Perda No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru.

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok.

Sehingga peningkatan akan transportasi harus ditata dan terus menerus di sempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dalam upaya menunjang perkembangan wilayah dan pemeratakan hasil-hasil pembangunan, pengangkutan dapat berperan sebagai penunjang (pelayanan), pemacu (pendorong), sekaligus pemicu (penggerak) perkembangan. Berkaitan dengan hal itu menuntut pihak-pihak pengelola jasa angkutan atau transportasi dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat mobilitas masyarakat dari suatu tempat ketempat lain.

Dengan kecanggihan dari transportasi yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan kebutuhan terhadap transportasi itu sangat tinggi. Ini terlihat dari banyaknya transportasi yang ada. Transportasi yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah angkutan umum. Karena jangkauan terhadap biaya angkutan ini sangat minim. Dan ini sangat diminati oleh masyarakat kaum menengah kebawah. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan dan armada angkutan itu sendiri.

Dengan tingginya akan kebutuhan jasa transportasi angkutan umum, para agen dan supir banyak melakukan kecurangan-kecurangan demi mendapatkan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan keselamatan penumpangnya. Bukti nyata yang terjadi masih banyak angkutan umum yang melanggar aturan yang berlaku seperti angkutan umum yang tidak memiliki izin yang sah atau illegal. Dampak dari masalah ini para angkutan umum yang telah memiliki izin sering kalah saing oleh angkutan umum yang tidak memiliki izin dikarenakan tarif pada angkutan umum yang illegal lebih murah ketimbang yang memiliki izin sah dan rata-rata armada yang digunakan oleh angkutan umum illegal ini lebih bagus karena banyak mobil-mobil

pribadi yang berubah menjadi angkutan umum.

. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*), dan fungsi pengawasan (*controlling*). Menurut Griffin (2004 : 44) keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Sarundajang (2005 : 240) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Handoko (1998 : 359) pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam organisasi maka tercapainya tujuan organisasi tersebut lebih terjamin.

Manullang (2001 : 184) pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Agar proses pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini tentu saja mempermudah demi tercapainya apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Sofyan (2004 : 12) pengawasan adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang

dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Fathoni (2006 : 30) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun menurut Irawan (2000 : 252) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan:

- a. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan ingin dilakukan
- b. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2001 : 186) adalah :

- a. Membuat kegiatan menjadi lebih mudah
- b. Mengadakan penilaian atau evaluasi
- c. Adanya tindakan perbaikan

Menurut Maringan (2004 : 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah :

- a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*preventive control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

Adapun fungsi pengawasan menurut Emie dan Saefulah (2005 : 12), yaitu :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indicator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004 : 62), fungsi pengawasan yaitu :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelainan, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan fungsi pengawasan adalah untuk mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan koreksi agar apa yang telah direncanakan dari awal dapat tercapai dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelainan, dan kelemahan yang tidak diinginkan.

Menurut Brantas (2009 : 191) manfaat pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaannya dan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan.

S.P Siagian (2004 : 130) pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat berbagai dari kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud adalah bahwa teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa karena aneka ragam kegiatan dan luasnya cakupan tanggung jawab, seorang menejer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu didelegasikan kepada orang lain.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus jelas dilihat dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh pelaksana kegiatan operasional.
5. Keluwesan pengawasan. Maksudnya pengawasan harus bersifat fleksibel.
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pengawasan sendiri harus segera diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula.
8. Pemahaman system pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Maksudnya para manajer selaku pelaksana kegiatan pengawasan harus dapat menentukan teknik pengawasan sebagaimana yang dibutuhkan dan alat bantu apa yang perlu dikuasai.
9. Penawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya, pengawasan yang baik harus menemukan apa yang salah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut.
10. Pengawasan harus bersifat membimbing. Berarti pengawasan yang tidak berakibat pada kondisi ketika para bawahan selalu diancam dengan

hukuman setiap kali ia berbuat kesalahan.

Menurut Maringan (2004 : 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah :

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*preventive control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

Adapun fungsi pengawasan menurut Emie dan Saefulah (2005 : 12), yaitu :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004 : 62), fungsi pengawasan yaitu :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelainan, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan fungsi pengawasan adalah untuk mengevaluasi hasil dari aktifitas

pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan koreksi agar apa yang telah direncanakan dari awal dapat tercapai dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelainan, dan kelemahan yang tidak diinginkan.

Menurut Brantas (2009 : 191) manfaat pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaannya dan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan.

S.P Siagian (2004 : 130) pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat berbagai dari kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud adalah bahwa teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa karena aneka ragam kegiatan dan luasnya cakupan tanggung jawab, seorang menejer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu didelegasikan kepada orang lain.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus jelas dilihat dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh pelaksana kegiatan operasional.
- e. Keluwesan pengawasan. Maksudnya pengawasan harus bersifat fleksibel.
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.

- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pengawasan sendiri harus segera diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula.
 - h. Pemahaman system pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Maksudnya para manajer selaku pelaksana kegiatan pengawasan harus dapat menentukan teknik pengawasan sebagaimana yang dibutuhkan dan alat bantu apa yang perlu dikuasai.
 - i. Penawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya, pengawasan yang baik harus menemukan apa yang salah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut.
 - j. Pengawasan harus bersifat membimbing. Berarti pengawasan yang tidak berakibat pada kondisi ketika para bawahan selalu diancam dengan hukuman setiap kali ia berbuat kesalahan.
- Adapun menurut Sarwoto (2010 : 28) pengawasan yang efektif yaitu:
- a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
 - b. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
 - c. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
 - d. Terpusat, dengan memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
 - e. Realitas secara ekonomis, dimana biaya system pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
 - f. Realistis dan organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
 - g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, Karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
 - h. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga

tidak harus dibuat system baru bila terjadi perubahan kondisi.

- i. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
- j. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tagging jawab dan prestasi.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat deduktif dan *meaning* (pemaknaan) tiap even merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dasar pertimbangan memilih penelitian kualitatif adalah (1) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat; (3) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan, (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (key informan) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik “*snowball sampling*” atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru (Studi Pada Angkutan Travel Luar dan Dalam Kota) terlebih dahulu dijelaskan tugas dari masing-masing pelaksana yang terkait dalam pelaksanaannya.

1. Kepala Dinas

Menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasi Sekretaris, memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan, melaksanakan pembinaan umum dan teknis, menyampaikan saran dan pertimbangan, melaksanakan tugas kedinasan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Kepala Bidang Wasdal

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, mengkoordinasikan, membina dan

merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Wasdal

Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya, pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepetingan lalu lintas di jalan dalam kota. melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas, merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan beban atau barang berbahaya lintas darat, melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota, menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan (*actuating*), yaitu pelaksanaan kegiatan dari apa yang telah dirancang dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, akuisisi atau pelaksanaan ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari didalam organisasi. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan, tanpa disertai pengawasan pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang sudah dilaksanakan, tanpa disertai pengawasan yang intensif, maka rencana-rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas pegawai menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pengelola kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya memberikan saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian. Jadi, pengendalian lebih luas dari pengawasan.

Dalam menjawab persoalan yang ada, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan atau standar setelah diadakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini dilakukan guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi ketentuan ini berupa :

a. Adanya Pembagian Tugas secara jelas

Dalam suatu pengorganisasian sangat dibutuhkan adanya pembagian kerja dari setiap personil yang bertugas. Dengan adanya pembagian kerja tersebut, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Waktu Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan pada angkutan travel di Kota Pekanbaru dibutuhkan waktu untuk dilakukannya pengawasan, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap petugas yang melakukan pengawasan dan dapat mengoreksi kinerja petugas apakah sesuai dengan prosedur yang ada dilapangan atau tidak.

c. Sosialisasi

Salah satu tindakan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan berupa sosialisasi yaitu pemberitahuan dan pengarahan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi atau kesalahan yang sama

2. Mengadakan penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang dilakukan hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang berupa laporan-laporan yang diberikan masyarakat atau petugas itu sendiri ini dapat berupa Media Cetak atau media lainnya yang berupa laporan.

b. Pengawasan Langsung

Proses mengamati secara langsung kelapangan dalam rangka pelaksanaan

pengawasan terhadap petugas yang melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan petugas dapat bekerja lebih bertanggung jawab

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa :

a. Pemberian Sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan angkutan travel. Baik yang dilakukan oleh petugas maupun oleh PO adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila petugas yang melakukan kesalahan akan dikenakan teguran dan pemberhentian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah

a. Sumber Daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru. Meski perintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terdapat kelemahan pada sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan

lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun juga kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor-faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat melalui :Kualitas petugas pengawasan, Jumlah petugas pengawasan

Kualitas dan jumlah petugas pengawasan adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik harus mengetahui benar standar yang telah ditetapkan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan terhadapnya pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru. Kualitas dan jumlah pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat adalah antara lain kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan.

b. Dana/biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan sebuah organisasi. Dalam pengawasan angkutan travel Dinas Perhubungan dalam menjalankan rencana kerja yang telah direncanakan dari awal, pihak Dinas Perhubungan sendiri

mendapatkan bantuan dana dari Walikota.

- c. Kendaraan operasional
Dalam proses pengawasan kendaraan operasional merupakan salah satu komponen yang penting dalam melaksanakan pengawasan, karena kendaraan operasional dapat mendukung setiap proses pengawasan agar berjalan dengan lancar. Dinas perhubungan sendiri memiliki kendaraan operasional berupa motor dan mobil.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru (studi pada angkutan travel luar kota dan dalam kota) belum berjalan dengan cukup baik.

- a. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Angkutan Travel Di Kota Pekanbaru
Penentuan standar dilihat dari segi pembagian tugas, waktu pengawasan serta sosialisasi dari dinas perhubungan terhadap angkutan travel ini masih belum berjalan dengan baik, karena dari pengawasan yang telah dilakukan dinas perhubungan melalui bidang wasdal yang sberkoordinasi dengan pihak kepolisian belum berjalan cukup baik. Dengan kondisi yang seperti ini masih rentan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, seperti masih banyaknya travel-travel plat hitam yang beroperasi. Seharusnya dinas perhubungan dan pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak pelanggaran ini.

Tindakan penilaian dari segi pengawasan tertulis dan pengawasan pengawasan langsung juga belum dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat beberapa laporan-laporan yang telah masuk ke dinas perhubungan tetapi belum ada tindakan tegas yang dilakukan guna mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan.

Tindakan perbaikan dari pemberian sanksi juga belum memeberikan efek jera, dapat dilihat dari travel-travel plat hitam yang masih bebas beroperasi dan masih enggan

mengalihkan plat hitam ke plat kuning agar travel yang illegal ini bisa menjadi legal.

- b. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru:

Faktor Sumber Daya Manusia yang meliputi jumlah personil dan kecakapan personil berkaitan dengan pemahaman prosedur kerja dan tanggung jawab yang diemban memiliki pengaruh dalam kinerja yang dihasilkan dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru.

Faktor biaya menentukan lancarnya program kegiatan yang dilaksanakan, karena dana yang kurang, pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar. Faktor biaya ini juga mempengaruhi kejujuran dan tanggung jawab.

Sedangkan faktor kendaraan operasional juga menentukan kelancaran dalam melakukan setiap pengawasan, karena pengawasan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar jika kendaraan operasional tersedia sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengawasan yang efektif akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Manullang, M, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta
- Maringan, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marnis, 2008, *Pengantar Manajemen*, Unri Press, Pekanbaru
- Sarundajang, H, 2005. *Babak baru Sistem pemerintah Daerah*, Katahastha Pustaa, Jakarta
- Sarwoto, 2010, *Dasar-Dasar Organisasi dan manajemen*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syafri, Sofyan, 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta
- Siagian, Sondang.P, 2003, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, Sondang.P, 2005, *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*, Jakarta, Bumi Aksara

- Siagian, Sondang.P, 2003, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Edisi Revisi, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sujamto, M. Arifin, 2003, *Sistem Pengawasan Manajemen*, PT Pustaka Quantum, Jakarta
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar manajemen*, Alfabeta, jakarta